



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PUPR RI, MENTERI PERHUBUNGAN RI, MENTERI DESA
PDT TRANSMIGRASI, KEPALA BMKG RI, DAN KEPALA BNPP/BASARNAS**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : Ke-14
Jenis Rapat : Raker dan RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 7 September 2023
Waktu : Pukul 15.20 WIB s.d. 16.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
Acara : Penetapan hasil pembahasan RKA K/L TA. 2024 mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
33 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
8 dari 12 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
3. Ir. Sudjadi
4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
5. Ir. Effendi Sianipar
6. Harvey B. Malaihollo
7. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
8. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
4. Ilham Pangestu
5. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
2 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. Sumail Abdullah
 2. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S. Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN

1. Menteri PUPR RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.),
2. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi),

3. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.),
4. Kepala BMKG (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.),
5. Plt. Kepala BNPP/Basarnas (Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang di pintu mohon izin, Pamdal tolong ditertibkan dulu pintunya ditutup. Yang tidak berkepentingan mohon untuk berada di luar. Pamdal pintunya tolong ditutup ya, baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita mulai rapat kita untuk Raker penetapan APBN tahun 2024, kita sudah molor dari jadwal. Semula kita rencanakan jam 2 *eh* jam 14 sekarang sudah jam 15.20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Kepala BMKG dan Plt. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta seluruh jajaran, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali rapat kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja pada hari ini, Kamis 7 September 2023 dalam rangka pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun 2024 mitra kerja Komisi V DPR RI yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Badan Nasional Pencarian Pertolongan dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Sesuai dengan informasi dari sekretariat, hari ini rapat ini sudah dihadiri oleh 35 Anggota Komisi V DPR RI dari 9 unsur fraksi yang berbeda maka sesuai Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum dan sesuai dengan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.20 WIB)

Terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kepala BMKG dan Plt. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada rapat hari ini dengan agenda penetapan hasil pembahasan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2024 mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun 2024.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Para Menteri dan para Kepala Badan yang kami hormati,**

Komisi V DPR RI bersama dengan pemerintah telah melaksanakan serangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat dalam rangka pembahasan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, yaitu:

1. Tanggal 29 Agustus 2023, Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Plt. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas),
2. Tanggal 30 Agustus 2023, Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan, kemudian
3. Pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 7 September 2023 telah dilaksanakan rapat dengar pendapat dengan para Eselon I dari masing-masing kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam rangka pembahasan program dan alokasi anggaran masing-masing unit organisasi Eselon I.

Sebagai lanjutan dalam rangkaian pembahasan anggaran tahun 2024 maka agenda Raker dan RDP kita pada hari ini adalah penetapan hasil pembahasan rincian program dan alokasi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun 2024 yang hasilnya akan segera disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Sesuai dengan jadwal pembahasan anggaran dari Badan Anggaran, komisi masih punya alokasi waktu dari tanggal 12 sampai 13 September 2023 untuk melakukan penyesuaian RKA K/L mitra kerja Komisi V DPR RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan juga melakukan sinkronisasi terhadap rincian program dan alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2024 sesuai masukan dan usulan Komisi V DPR RI.

Berdasarkan hasil rapat-rapat pembahasan RKA K/L kementerian lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 beberapa waktu lalu maka rincian program dan alokasi anggaran untuk masing-masing mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut, tolong tampilkan tabelnya.

Baik.

Kita lihat ya ini kementerian/lembaga, kemudian kita mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya:

- Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pagu kebutuhan Rp190.743.036.298.000,00 Kemudian di Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp146.987.447.201.000,00. Ada *backlog* sebesar Rp43.755.589.097.000,00. Dengan rincian Sekretariat Jenderal, pagu kebutuhan, saya tidak perlu bacakan ya di pagu kebutuhan, kita lebih kepada langsung saja di Nota Keuangan RAPBN-nya. Nanti saya tidak perlu bacakan juga selisihnya ya karena itu tidak dalam dokumen kita, nanti di dokumen APBN adalah di Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, ya. Sekretariat Jenderal Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar 578 miliar, Sekretariat Jenderal Rp578.736.341.000,00; kemudian
- Inspektorat Jenderal Rp91.232.000.000,00;
- Dirjen Bina Marga 55 miliar, *sorry* Rp55.399.768.580.000,00. Di Pagu Kebutuhan ini ada penambahan sebetulnya ini saya bacakan untuk kebutuhan itu sebetulnya ada Rp77.722.959.795.000,00 ini berbeda dengan Lapsing kita yang lalu di rapat kita terdahulu dengan 6 September ya pada tanggal 6 September ini RDP ini dengan Bina Marga, pagu kebutuhannya adalah Rp62.085.406.920.000,00 ini ada penambahan kebutuhan terkait dengan Inpres Jalan Daerah; kemudian di
- Dirjen Cipta Karya, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp32.704.222.429.000,00;
- Dirjen Sumber Daya Air Rp47.644.049.911.000,00; kemudian
- Dirjen Perumahan Rp9.251.957.240.000,00;
- Dirjen Bina Konstruksi Rp590.514.956.000,00;
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah nota keuangannya Rp142.328.583.000,00;
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp425.138.972.000,00; kemudian
- Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nota keuangannya adalah sebesar Rp159.498.189.000,00.

Dengan total Kementerian Perhubungan *eh* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp146.947.447.201.000,00.

Kemudian berikutnya Kementerian Perhubungan, Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.477.079.886.000,00, dengan rincian:

- Sekretariat Jenderal Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp645.574.148.000,00;
- Inspektorat Jenderal Rp111.108.529.000,00; kemudian
- Dirjen Perhubungan Darat Rp6.642.204.664.000,00;
- Dirjen Perhubungan Laut Rp9.499.464.798.000,00;
- Dirjen Perhubungan Udara Rp7.673.375.788.000,00;
- Dirjen Perkeretaapian Rp9.689.137.480.000,00;
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp3.693.390.420.000,00;
- Badan Kebijakan Transportasi Rp192.948.758.000,00;
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329.875.301.000,00.

Dengan total seperti yang tadi saya sampaikan Kementerian Perhubungan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp38.477.079.886.000,00

Kemudian Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp2.757.268.382.000,00. Saya ulangi Rp2.757.268.382.000,00. Dengan perincian Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi:

- Sekretariat Jenderal Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp224.132.191.000,00;
- Inspektorat Jenderal Rp39.122.128.000,00;
- Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp139.396.280.000,00;
- Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan sebesar Rp165.971.931.000,00;
- Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp224.688.993.000,00;
- Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp75.564.956.000,00;
- Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp193.270.954.000,00;
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp1.695.120.909.000,00.

BMKG Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp2.769.700.001.000,00, dengan rincian:

- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.230.529.425.000,00;
- Program BMKG Rp1.539.170.576.000,00.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp2.085.102.085.000,00, dengan perincian:

- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp896.365.825.000,00;
- Program Pencarian dan Pertolongan dan Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp1.188.736.260.000,00;

Terkait dengan angka-angka ini, saya tanya dulu sebelum kita sahkan. Apakah ada perbedaan antara yang kami bacakan dengan yang ada di kementerian? karena ini nanti kita kirim ke Badan Anggaran dan ini jadi dokumen di Paripurna, selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

Saya tanya satu per satu dulu mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kalau ada perbedaan *nuwun sewu* Pak Menteri, mohon izin, saya persilakan.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Tidak ada perbedaan, Bapak Ketua. Jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Pak Menteri.

Kita ketok ya yang Kementerian PUPR.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Kementerian Perhubungan, mohon izin Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, sama dengan yang disampaikan.

KETUA RAPAT:

Sama, baik tidak ada perbedaan angkanya juga sama kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, silakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih, angkanya sama dengan yang ada di dokumen.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Pak Menteri, kita juga ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

KEPALA BMKG RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.SC., Ph.D.):

Terima kasih, Pak, sama.

KETUA RAPAT:

Baik, angkanya juga sama kita sahkan.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kami persilakan.

Plt. KEPALA BNPP/BASARNAS RI (Dr. ABDUL HARIS ACHADI, S.H., DESS):

Terima kasih, sama, Bapak.

KETUA RAPAT:

Angkanya sama, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian sudah terjadi kecocokan angka dan tidak ada selisih dari alokasi fungsi dan program yang merupakan kewenangan Komisi V untuk melakukan pembahasan bersama mitra kerja.

Poin yang kedua dari kesimpulan kita pada hari ini adalah, yang kedua Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN Tahun 2024 sesuai dengan saran, masukan dan usulan Komisi V DPR RI.

Bapak-Ibu sekalian,

Angka ini kemungkinan masih bisa berubah, manakala nanti setelah dikirim ke Badan Anggaran. Dari Badan Anggaran itu ada tambah kurang biasanya, biasa *sih* tidak mengurangi, kadang-kadang ada alokasi tambahan yang masuk ke Komisi V, kadang juga tidak ada. Manakala nanti ada berarti kita akan melakukan rapat kembali untuk mengesahkan kembali angka tambahan dari Badan Anggaran yang dimaksud.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian terkait dengan angka-angka ini, sudah saya sampaikan untuk kita saahkan secara bersama. Berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran untuk masing-masing kementerian lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun 2024 tersebut. Kami meminta dahulu tanggapan sekaligus persetujuan dari seluruh Anggota Komisi V DPR RI. Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tadi kami masih menyisakan satu. Ya, kalau yang lain-lain tinggal sinkronisasi program saja. Saran dan masukan dari Komisi V DPR RI nanti saya sudah sampaikan tadi, Pak, tadi saya sempat telfon Pak Menteri ketika beliau sedang berada di acara *Asian Summit* tadi, mohon maaf tadi kami mengganggu Pak Menteri, *nuwun sewu*, terkait dengan program berbasis masyarakat. Mohon izin Pak Menteri untuk diberikan tanggapan supaya seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V dapat mendengarnya. Saya persilakan.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Bapak Ketua,

**Bapak-Bapak Wakil Ketua,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,**

Terima kasih atas kesempatannya. Memang dalam rencana kami pada Raker hari ini akan merespon hasil RDP dari masing-masing Direktorat Jenderal. Ternyata isunya yang paling banyak adalah tadi, infrastruktur berbasis masyarakat di mana Bapak-Bapak lebih banyak menyampaikan untuk kembali kepada disamakan pada tahun 2023 ini.

Bapak-Bapak sekalian,

Dalam Raker yang lalu dengan saya kira semua Bapak-Bapak Menteri yang ada disini mendengarkan arahan Bapak Presiden bahwa anggaran tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju ini diprioritaskan untuk penyelesaian program-program prioritas dan program-program terutama Program Prioritas Nasional (PSN). Namun demikian, berdasarkan diskusi Bapak-Bapak dengan Para Eselon I Direktorat Jenderal, kami juga tadi sempat berdiskusi dengan Eselon I lainnya.

Untuk itu, kami ingin menyampaikan bahwa untuk infrastruktur berbasis masyarakat kami akan sekali lagi kami upayakan ada dua hal: pertama, kami akan menyisir lagi terutama untuk di Bina Marga misalnya kan Bapak-Bapak selalu dalam rapat kerja biasanya untuk Padat Karya Bina Marga ini kan kurang menarik buat Ibu-Bapak sekalian, susah Ibu-Bapak sekalian untuk mengkonversi itu kepada suara, ini kita *open* saja. Untuk itu, kami akan sisir itu akan coba untuk menambahkannya, tapi semaksimal mungkin. Yang kedua, kami juga ingin nanti pada saat 2024 ini kan pasti ada tender dini. *Nah*, sisa tender itu walaupun dari DIPA yang lain-lain akan kami pakai semuanya untuk memenuhi meningkatkan Padat Karya itu.

Saya kira itu Bapak yang kami bisa sampaikan. Jadi kami akan berupaya untuk menambah itu, mohon maaf belum bisa kami sampaikan sekarang angkanya tapi akan kami karena baru selesai tadi siang atau yang kemarin-kemarin kan baru juga kami belum sempat menyisirnya lagi. Tapi saya dalam pikiran saya ada beberapa peluang untuk bisa kita alihkan ke IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat).

Demikian Bapak kami sampaikan. Mohon dukungan dan dari Ibu-Bapak sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Ini yang menyampaikan Pak Menteri langsung tentu ini ada proses ya, nanti ada proses.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Kalau begitu bisa ditulis di dalam kesimpulan atau kalau pada Bapak menandatangani lembar keuangan ditulis sebagai catatan.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti kita bikin kesimpulan rapat ya khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mungkin. Karena ini nanti kesimpulan rapat ini kan kita bawa ke Badan Anggaran ya, Bu, ya yang kesimpulan rapat yang ini. Mungkin, Pak Menteri, kita mungkin buat kesimpulan rapat satu lagi ya saya rasa itu boleh ya. Tapi itu nanti kesimpulan rapat Pak Menteri dengan Komisi V, yang tidak kita kirim ke Badan Anggaran. Pak Hamka begitu ya? setuju Pak Hamka ya? kalau itu *ndak* bisa kita kirim ke Banggar, Pak, kesimpulan itu *ndak* bisa kita kirim ke Banggar. Tapi yang ini angka-angka yang ini kita kirim ke Banggar ini kesimpulan rapatnya ya, nanti bersamaan dengan surat dari Komisi V DPR RI yang melampirkan kesimpulan rapat. Di kesimpulan rapat yang satu poin saja itu bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Komisi V DPR RI sepakat untuk program infrastruktur berbasis masyarakat minimal sama dengan Tahun Anggaran 2023 yang lalu. Setuju ya?

INTERUPSI F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Irwan, atau sebentar Pak Irwan dulu Pak Menteri, saya persilakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Di sini Banggar juga, Ketua, dilirik-lirik juga di sini.

KETUA RAPAT:

Oh, iya *sorry, sorry* di sini Banggar. Wakil Ketuanya ada di sana itu mana Pak Syarif tadi ya, maka saya ngintip ke sana tadi, oh tadi ada, mungkin. Oh siap, dinda ini. Pak Boy Banggar bukan? Oh, Banggar juga.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Eh, Dinda, soalnya Boy lebih tua.

Silakan Pak Sigit, silakan.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Ya, Pak Ketua, terima kasih.

Ini di hadapan teman-teman Banggar dan di hadapan teman-teman Anggota Komisi V, ya. Berarti saya ingin menegaskan saja bahwa yang kita setuju adalah angka gelondongan dari Kementerian PU. Angka per direktorat mungkin ada perubahan karena tadi Pak Menteri mengatakan sisa lelang itu mungkin akan kita konsolidasikan dan seterusnya dan seterusnya untuk *menambahi* program-program infrastruktur berbasis masyarakat. Padahal program infrastruktur berbasis masyarakat itu ada di Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga dan yang lain-lain. Jadi pertanyaan saya kepada Pimpinan, apakah kita akan setuju angka-angka di Dirjen-Dirjen? Atau kita hanya akan setuju yang global saja yang angka kementerian saja?

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi begini makanya saya tadi kan sudah sampaikan di awal ada proses, tentu proses ini nanti di Kementerian, Pak. Ini memang harus saling *trust* kita karena bicara ini Pak Menteri, masak kita *enggak* percaya sama Pak Menteri? Terakhir yang bisa kita tanya *nih* dan Pak Menteri sudah menyampaikan langsung. *Nah*, proses administratif keuangan di pemerintah tentu kementerian akan menyesuaikan, kan begitu, Pak. Jadi nanti ada proses, pasti ada perubahan nanti jatuhnya, ada perubahan dari sisa lelang. Kemudian Pak Menteri lagi akan menyisir di sana mana yang bisa dikerjakan, tentu nanti ada perubahan DIPA, Pak, di kementerian, ini prosesnya sudah antara kementerian dengan Kementerian Keuangan, pemahaman saya seperti itu.

Silakan Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dengan kami kalau manakala ini belum lengkap.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Ketua.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua, sebelum Pak Menteri saya mau...

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Tadi kan masih ada yang disisir-sisir gitu kan, saya membayangkan sisirnya sebesar apa kira-kira?

KETUA RAPAT:

Ya, kita serahkan ke Pak Menteri untuk menjawab, silakan Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Oke, terima kasih.

Jadi tata kelolanya kalau itu revisi DIPA di dalam Direktorat Jenderal pasti internal PU. Tapi kalau biasanya kalau revisi DIPA-nya merubah apa pagu Direktorat Jenderal pasti ke Komisi V. Jadi Bapak-Bapak pasti tahu, itu tata kelolanya, Pak, dan kami selesai pasti begitu, kalau ada tambahan setelah Raker pun pasti kami laporkan kan, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi nanti begini izin, Pak Menteri.

INTERUPSI F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Pak Ketua, tambahan sedikit.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, kita pemahaman ini supaya kita *enggak* kalut, Pak, ini pemahaman proses ini, komitmen sudah ada.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Iya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar. Proses sudah ada, komitmen sudah ada, sekarang tinggal proses. Jadi nanti dari kementerian laporkan lagi ke kita, Pak. Kementerian akan menyampaikan lagi kepada kita setelah dilakukan penyisiran sekian tambahan, nanti akan dilaporkan. Kemudian dalam proses nanti sisa lelang, kita kan juga kan ada rapat pengawasan terkait dengan serapan anggaran. *Nah*, itu momen bisa kita gunakan untuk seberapa besar sisa lelang yang ada yang bisa ditambahkan untuk program infrastruktur berbasis masyarakat.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Sebelum Pak Suryadi, Pak.

INTERUPSI F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Pak Ketua.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Sebentar, Pak. Jadi ini balik lagi tata kelola, kalau kami merevisi DIPA antar program ke Kementerian Keuangan pasti mereka minta persetujuan dari DPR. Itu tata Kelola, jadi *enggak* ada selingkuh.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Saya berpacu dengan waktu.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan, Pak Suryadi.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi selain kita bicara volume alokasi anggaran, saya juga ingin menegaskan tentang waktu, Pak, karena SK ini jangan sampai ini nanti ditengah tahun gitu. Kita ingin misalnya Januari, Februari atau Januari itu sudah SK IBM kita, Infrastruktur Berbasis Masyarakat ini sudah bisa dikeluarkan. Walaupun mungkin realisasinya bisa nanti bertahap gitu, tapi SK-nya sudah bisa lebih awal, itu Pak Ketua. Karena komitmen kita kan seperti itu, itu hanya mengingatkan saja.

KETUA RAPAT:

Baik, itu saya rasa tanggung jawabnya ada di Pak Menteri.

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri, sebentar Pak Menteri dulu biar kita nyambung. Silakan Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Kalau SK itu tergantung Bapak-Bapak, kalau Bapak-Bapak masuk lebih cepat, SK-nya cepat.

KETUA RAPAT:

Oke terjawab ya, Pak Sumail.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Iya, sedikit, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Menteri dan jajaran

Saya cuma membayangkan begitu masih berupaya menyisir, karena tempo hari diskusi kita dengan Pak Menteri bahwa itu kan percepatan secara SK kira-kira di bulan November. *Nah*, sementara volume dan jenis kegiatan belum ada di Padat Karya bagaimana kita akan mencoba mengusulkan calon penerima bantuan atau kelompok-kelompok masyarakat yang apa namanya infrastruktur berbasis masyarakat ini. Itu mohon gambaran barangkali supaya kita lebih bisa meyakinkan kepada mereka masyarakat di bawah-bawah, tahun depan kira-kira sudah...

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya sudah bisa tangkap, Pak Sumail. Yang penting jangan merokok Pak ya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Siap, ampun Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi, apa namanya Pak Menteri tadi sudah jawab. Kita sepakat minimal sama dengan tahun lalu, itu kan kata kuncinya dengan anggaran tahun lalu gitu ya. Proses, tentu ini perlu proses. Tadi Pak Menteri juga sudah bilang kalau SK mau cepat tergantung Bapak-Bapak, tentu basisnya adalah minimal sama dengan tahun lalu kan begitu. Jangan ajukan lebih ya minimal sama dengan tahun lalu kan itu kesepakatan, Pak, ya tentu ini proses. Bisa dipahami, Pak? konkrit ya? konkrit iya. Kalau konkrit boleh saya ketok ini?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebentar.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Roberth silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Menteri, saya cuma ingatkan kita kembali semua. Kita pernah di tempat ini pun kita bersama Pak Menteri, dulu saya ingat benar kita sudah sepakat bahwa nanti sisa anggaran itu akan dibicarakan dengan Anggota Dewan untuk dialokasikan untuk seperti yang kita mau lakukan seperti ini, berbasis massa apa Padat Karya, itu tidak bisa kita lakukan pada waktu itu tahun lalu, Pak Menteri. Karena Kementerian Keuangan langsung yang namanya sisa anggaran itu langsung masuk kembali kepada Kementerian Keuangan, jadi kami tidak bisa lakukan itu. Padahal di kesimpulan rapat pada waktu itu jelas, kami sudah sepakat, ya teman-teman masih ingat, saya ingat benar ya saya hadir. Jadi ini yang ingin saya ingatkan, nanti jangan sampai kita tidak keluar, kita ribut lagi sama Pak Menteri, karena ini ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan ya. Kita semua tolong dicek kembali kalau saya salah ya, mohon maaf Pak Menteri, saya harus sampaikan ini karena saya...

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Sebentar, Pak...

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Menteri, jadi gini Pak Roberth, mohon izin Pak Menteri. Ini kan yang sudah bicara Pak Menteri ini tentu ada proses kan saya sudah bilang. *Nah*, tadi Pak Menteri sudah disampaikan ini rapat juga direkam, kesimpulan rapat kita bikin ya nanti kita bikin. Kalau dulu kita *enggak* pernah begini saya masih ingat *kok* dulu belum pernah kita bikin, dulu kita sudah sepakat. Dulu kan kita selalu sepakat, Pak, *ndak* ada dulu yang kita tidak sepakat, baru kali ini kita tidak sepakat, ya seingat saya. Pak Ridwan adakah kita tidak sepakat dulu? tidak ada kan? sepakat semua, jadi tidak ada proses yang seperti ini, tentu ini akan berbeda, Pak.

Jadi kita beri kepercayaan kepada Pak Menteri kalau menurut saya itulah maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi kita juga jangan memberi beban kepada Pak Menteri, sesuatu yang tidak mungkin juga kalau kita ada di sana kita tidak bisa melakukannya. Jadi saya rasa Pak Roberth ini sudah Pak Menteri yang menjamin dan Pak Menteri yang menyampaikan *gitu loh* kepada kita semua bahwa basisnya minimal sama dengan tahun lalu, itu dulu. Bagaimana mengejar angka itu? tadi Pak Menteri sudah sampaikan, kita percayakan pada Pak Menteri prosesnya ya. Jadi saya rasa cukup ya Bapak-Ibu sekalian ya? cukup ya?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Satu lagi.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau cukup saya ketok ya.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ketua, satu lagi Perhubungan belum.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya.

KETUA RAPAT:

Ndak, sebentar kita bicara PU dulu, Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Satu-satu ya.

KETUA RAPAT:

Iya, oke satu-satu. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

F-P. GERINDRA (Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Eddy Santana, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Iya, jadi saya heran *kok* jadi malah mundur lagi *gitu* tadi disampaikan dari Januari padahal di Dirjen Cipta Karya saja itu di *timeline*-nya itu Desember selesai, di pertengahan Desember *udah* SK Menteri, kita malahan mau maju sedapat mungkin lagi. Tapi ini tergantung kita juga tadi kan ada usulan, verifikasi kemudian proses surat putusan. Saya kira ini, jangan lewat dari Desember.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.

Tadi kan sudah disampaikan sebenarnya *ndak* perlu diulang ini, kecepatan itu kan tergantung kita tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Kalau saya tidak salah nangkap ya, seberapa cepat kita memasukan usulan dan program. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kita setuju ya?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Sekarang Pak Roberth masih ada interupsi? Ya, untuk Kementerian Perhubungan sudah ya?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Perhubungan?

KETUA RAPAT:

Iya, Kementerian Perhubungan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, saya kira untuk Perhubungan, kita juga harus sama bahwa program untuk aspirasi Anggota, ya kalau di PUPR itu kan jelas ada tadi kita sampaikan BSPS dan sebagainya. Perhubungan itu yang paling kita harapkan adalah lampu dan bis untuk bantuan kepada sekolah yang berbasis pendidikan ya. Ini perlu juga kita minta supaya harus ada peningkatan dari yang kemarin karena yang berbasis pendidikan sampai sekarang kemarin Pak Dirjen Darat sudah sampaikan paling lambat bulan apa Pak Dirjen? iya? minggu pertama Oktober ya, Pak Menteri kita catat sama-sama, Pak Menteri. Dan kita minta juga untuk yang 2024 ini kalau bisa tidak boleh kurang, harus ditambah, itu untuk bis.

Untuk lampu Pak Menteri, kita tahu semua bahwa masyarakat di perkampungan pedesaan itu sangat membutuhkan itu. Kalau ada ketentuan syarat-syarat yang mengharuskan itu penempatannya di jalan negara, tidak bermanfaat untuk kami di daerah dan hampir jalan negara semua sudah punya. Yang diperlukan adalah di jalan-jalan di desa, kampung ya itu yang sangat membutuhkan penerangan masyarakat di sana, kita taruh di jalan negara di situ tidak ada manfaatnya maka kami minta kepada Pak Menteri Perhubungan ini harus tidak lagi dengan syarat-syarat itu. Kalau ada syarat itu kami minta dipindahkan saja program itu, hilangkan saja, masukkan ke bis. Karena daerah kami sangat membutuhkan itu anak-anak sekolah ya sangat membutuhkan, kami berikan kepada Pemda untuk mengelola bagaimana mengangkut anak-anak sekolah ya dari kampung untuk bisa masuk ke kota. Karena yang diberikan selama ini kita saya lihat sendiri bagaimana mereka berdesak-desakan

di atas bis masih tidak mampu untuk mengantisipasi kekurangan angkutan yang ada di daerah kami. Itu Pimpinan ya.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya rasa cukup ya Pak Roberth sampaikan tadi ya perhubungan ya cukup ya?

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pimpinan, saya, Pak Ketua, boleh sedikit saja?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua terkait dengan Perhubungan, anggaran Perhubungan pada intinya kami setuju dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan Pak Roberth, Pak Wakil Pimpinan tadi.

Kami hanya ingin menanyakan satu hal kepada Pak Menteri, karena Pak Menteri pernah menyatakan bahwa PSO untuk KCJB itu tidak ada. Sementara, Pak Presiden itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau *public service obligation* kepada KCJB. Kami minta penegasan saja apakah ada subsidi PSO di daftar Dirjen-Dirjen yang ada di Kementerian Perhubungan? Kalau tidak ada kami sepakat sebagaimana Anggota. Tetapi kalau ada kami ingin itu dicatat *minder haze* nota bahwa Sigit Sosiantomo tidak setuju dengan anggaran.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Sigit.

Mungkin Pak Menteri bisa jawab sekalian.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Jawaban singkat, tidak ada.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi tetap tidak ada.

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Dedi Wahidi, silakan, habis itu, Pak Sumail. Pak Dedi dulu, silakan Pak Dedi.

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Terima kasih, Ketua.

Sependapat dengan Pak Roberth sampaikan tadi mengenai PJO, Pak, yang sangat membutuhkan itu di desa, Pak. Oleh karenanya, maka harus dibolehkan juga yang ke desa. Kalau terpaksa kementerian membuat dua program, itu program jalan nasional dan program jalan desa.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Sumail, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, Pimpinan untuk kedua kalinya.

Jadi rapat ini selain direkam di sini Ketua, tentu apa namaya disaksikan oleh masyarakat luas utamanya di Dapil saya. Saya barusan dapat WA dari Pak Bupati kaitannya mengingatkan kepada Pak Menteri tentang pelabuhan Kalbut yang tiga tahun kami sudah bicara di sini. Kami menitipkan aspirasi karena memang kebutuhannya dalam rangka untuk men-*trigger* kebutuhan ekonomi di sana. Kalbut Situbondo, Pak Menteri, di mana itu menjadi bukan hanya penyangga ya karena banyak kapal-kapal besar asing bersandar, apa lempar jangkar di tengah lautan maka saya kira kalau bisa di pinggirkan ini akan itu.

Terima kasih, itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini balik ke belakang terlalu jauh *nih*. Ya saya rasa cukup ya Kementerian PU ya, Kementerian Perhubungan ya? Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Ya, baik sudah.

Kemudian Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian BMKG? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Basarnas? baik.

(RAPAT: SETUJU)

Ya, tinggal kesimpulan rapat satu untuk Kementerian PUPR ya satu poin. Tadi untuk program infrastruktur berbasis masyarakat akan dilakukan penyesuaian untuk minimal sama dengan APBN Tahun 2023. Itu nanti di luar kesimpulan rapat yang ini berarti Pak Menteri bersama kita nanti menandatangani dua kesimpulan rapat khusus untuk Kementerian PUPR.

Demikian, Bapak-Ibu sekalian. Dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini.

INTERUPSI F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Saya ingin menggunakan forum terhormat ini untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh Mitra, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri PDT dan Transmigrasi. Ini hak saya menyampaikan terima kasih, BMKG, Basarnas, terima kasih kerja samanya membangun negeri. Hidup Rakyat.

KETUA RAPAT:

Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Irwan.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Sigit, silakan.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Saya ingin menggunakan hak sedikit saja satu menit. Untuk anggaran Kementerian Desa Tertinggal, komentar saja bisa didengarkan oleh Pak Menteri bisa

enggak juga *enggak* apa-apa, Pak Menteri. Ada di anggaran itu kalau *enggak* salah ada 75 miliar tadi dibacakan, Pak Ketua, apa namanya itu anggaran 75 miliar, sederhana saja.

KETUA RAPAT:

Kementerian Desa.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Percepatan.

KETUA RAPAT:

Iya, percepatan.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Percepatan pembangunan daerah tertinggal 75 miliar. Pak Ketua, terus terang saya hati nurani saya tersentuh ya karena 75 miliar untuk seluruh Indonesia itu. *Nah*, oleh karena itu saya usul saja namanya diganti nama Dirjen-nya Dirjen Monitoring Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Usul saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu bukan kewenangan beliau, Pak.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Tapi kan saya partai oposisi pasti *enggak* didengarkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu masuk Menpan RB dulu itu.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Jangan gara-gara kecil angkanya mau dirubah.

INTERUPSI F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan Pak Suryadi.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Iya, saya minta waktu satu menit menyerahkan berkas ke Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Masih ada lagi.

KETUA RAPAT:

Kalau masih ada yang tersisa, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Ada lagi, Pak, ada lagi Pak.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Ini partai oposisi menyerahkan berkas ini.

PESERTA RAPAT:

Mana Vi, mana berkasnya? bawa masuk, Vi.

PESERTA RAPAT:

Yang penting di-amin-kan semua ya.

PESERTA RAPAT:

Amin menuju Indonesia maju.

PESERTA RAPAT:

Pak Sigit, salaman dulu kepada Menteri PDT itu.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian.

Dengan disepakatinya kesimpulan rapat kita hari ini maka selesailah rapat kita dalam rangka pengesahan anggaran mitra kerja Komisi V untuk APBN Tahun 2024 ya.

INTERUPSI F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Interupsi Pimpinan. Interupsi sedikit saja boleh ya? sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Kalau bukan DPP *enggak* aku kasih.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Oh, bukan ini bukan karena DPP.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih.

Bapak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan beberapa waktu yang lalu saya kunjungan ke daerah. Mohon apa yang sudah saya sampaikan pada rapat kemarin bisa ditindaklanjuti karena ada masyarakat di desa terpencil tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pak Menteri, eh Pak Menteri lagi, Pak Ketua, saya walaupun bukan DPP PDI, Gerindra loh, DPP juga

KETUA RAPAT:

Silakan silakan.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Saya minta maaf terlambat. Saya cuma mau minta sama Pak Basuki, Pasar Kroya Kabupaten Cilacap. Itu saja yang lain sih semuanya oke, yang lain terserah itu ketok-ketok tadi saya *enggak* dengar setuju semuanya lah.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Maka dengan demikian.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini Bapak sudah menyerahkan map paling banyak masih interupsi lagi. Iya singkat saja, Pak, silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Iya, baik/

Terima kasih, Pak Ketua.

**Pertama, Pak Dr. Ir. H. Muhammad Basuki Hadimoeldjono,
Dan juga kedua Bapak Dr. Ir. Budi Karya Sumadi beserta seluruh jajarannya,
Dan juga ketiga Bapak Drs. H. Abdul Halim Iskandar serta seluruh jajarannya,**

Ini luar biasa kita punya aset.

KETUA RAPAT:

Sudah selesai, Pak? sudah selesai? Ya, langsung saja tepat sasaran apa ini maksudnya ini.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Maksud saya kita lihat pemaparan dari semua kementerian ini lebih banyak dititikberatkan pada Program Prioritas Nasional terutama IKN. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengingatkan kita semua, tidak hanya mitra untuk jangan kita abai terhadap kawasan-kawasan yang masuk kategori 3T karena ini juga menjadi harapan dan perhatian besar Bapak Presiden RI ke-7 Bapak Ir. H. Joko Widodo.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya rasa cukup ya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Pimpinan satu kali Pimpinan, sebelum ditutup.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H. SUMAIL ABDULLAH):

Saya serahkan kepada Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Tadi *ndak* sempat merokok dulu tadi ya? Silakan. Iya, ngerokok *ndak* balik-balik ini. Ini gayanya aja lebih banyak daripada ngomongnya ini. Dia lupa cerita Pak Robert dulu ini.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Selesailah rapat kita pada sore hari ini.

Sebelum saya tutup saya beri kesempatan kepada pemerintah mewakili untuk menyampaikan kata-kata penutup.

Silakan Pak siapa yang ditunjuk, silakan Pak Menteri Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Ketua Komisi V, Wakil Ketua Komisi V dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya muliakan,

Hari ini walaupun pertanyaan sedikit tapi pertanyaannya mendalam ya terutama untuk Pak Basuki. Jadi, saya ini sahabat baiknya Pak Basuki, biasanya kalau janji itu ditepati. Tepuk tangan untuk Pak Basuki. Jadi sekali lagi kami berempat dan jajaran mengucapkan terima kasih bahwa ada dialog yang bagus antara pemerintah dengan DPR, menunjukkan bahwa sikap kritis itu justru mendewasakan kami. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa menjalankan proyek-proyek ini untuk bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Bapak-Ibu sekalian,

Ini hari yang sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Untuk Kabinet Indonesia Maju, inilah rapat penetapan anggaran terakhir antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah, ya. Kita berdo'a mudah-mudahan para Menteri sehat walafiat, Kepala Badan ya, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas ya sehat walafiat panjang umur, amin. Kita semua diberi kekuatan dan terus semangat untuk membangun negara Indonesia tercinta ini, amin. Dan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang masih berniat maju lagi untuk jadi Anggota DPR dan masih kepingin menjadi Anggota Komisi V semoga akan terpilih semuanya untuk bisa duduk di sini lagi. *Nah*, soal Pimpinan bisa berganti ya, itu tergantung ya.

Jadi karena ini momen terakhir penetapan APBN antara mitra kerja Komisi V dengan Komisi V DPR RI. Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota menyampaikan terima kasih Pak Menteri atas kerja sama kita selama ini dengan mitra kerja Komisi V baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT Transmigrasi, BMKG dan Basarnas. Tentu ada banyak cerita, banyak dinamika, banyak suasana kadang-kadang sampai hati pun terbawa dalam pembahasan baik ketika kita membahas APBN, maupun kita melakukan pembahasan kepada seluruh jajaran kementerian. Saya atas nama Pimpinan juga mengucapkan terima kasih baik para Sekjen, para Dirjen, para Direktur yang sudah dengan sabar mendampingi mendengarkan pendapat, saran, masukan Komisi V DPR RI baik di dalam ruangan ini maupun ketika kita berada di lapangan di saat kita melakukan kunjungan-kunjungan kerja dalam kami melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI ini.

Bapak-Ibu sekalian,

Tentu ada banyak kadang-kadang salah kata, salah sikap, khilaf dalam bahasa khilaf dalam sikap. Atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala kerja kerasnya selama bermitra dengan kami di Komisi V DPR RI.

Saya akhiri rapat hari ini dengan mengucap, silakan Pak Menteri, Pak Menteri interupsi ini.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Nah, ini saya terbawa juga terbawa arus.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota DPR RI Komisi V yang terhormat dan kami muliakan,

Kami mohon maaf atas nama rekan-rekan kami di sini juga mengucapkan mohon maaf dalam pergaulan kita dengan pasti dengan berharap yang sudah kita lakukan sekarang ini ada dua hal: pertama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan

bersama, jadi saya makai kita bukan kami tapi kita bersama, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga bermanfaat untuk Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian.

Harapan kami kalau kami besok sudah pensiun berarti Bapak-Bapak masih bisa melanjutkan di sini. Ini harapan kami betul karena kalau Bapak-Bapak ada di sini minimal kami punya kontribusinya. Kami hanya, kami cuma *nempil* pahalanya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah buat kita semua. Selamat berjuang selamat mengikuti apa kontestasi Pileg, mudah-mudahan kita tetap bersatu. Indonesia tetap maju terutama Madura, oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mitra kerja Komisi V. Berdiri lah, saya minta semua Anggota berdiri lah, silakan duduk kembali.

Ini perjalanan panjang dengan Pak Basuki beberapa kami, kita di ruangan ini sudah 10 tahun bersama. Demikian juga dengan Pak Menteri Perhubungan, demikian juga Bu Kepala BMKG ini juga sudah melewati satu periode kepemimpinan, siklus kepemimpinan di Republik ini, tentu ada banyak cerita. Ya, kami berterima kasih sekali lagi Pak Menteri, sukses di Pemilu yang lalu juga ada salah satunya berkat mitra kerja Komisi V buat kami yang ada di sini ya. Tentu saya bilang tadi banyak cerita baiknya, ya kadang-kadang kita ada silang pendapat dan seterusnya. Tadi Pak Menteri bilang kritik dan saran itu menurut Pak Menteri Perhubungan itu akan mendewasakan kita semua. Tetapi niat kita sama, bagaimana kita membangun Republik ini untuk terus lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi ya, Merdeka! Ya.

Terima kasih, saya akhiri. Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya tutup dan saya nyatakan selesai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB)

JAKARTA, 6 September 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

